

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Persaingan antar partai politik yang terjadi dalam sebuah pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah hal yang lumrah terjadi dan tidak asing kita dengar. Hal ini juga yang kerap menjadi topik bahasan di berbagai media serta bagi dunia politik dalam setiap negara, terutama negara-negara yang mengadopsi sistem demokrasi. Esensi dari pemilu dalam sebuah negara demokrasi adalah sebagai sebuah suksesi kepemimpinan yang melibatkan peran serta rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari beberapa pemilu yang dilakukan di berbagai negara, ada beberapa penyelenggaraan pemilu yang menarik perhatian dan patut menjadi bahan kajian. Salah satunya adalah penyelenggaraan Pemilu Argentina pada 2007 lalu. Pada pemilu tersebut, Cristina Fernandez de Kirchner berhasil mengungguli para pesaingnya dengan keunggulan cukup telak hanya dengan satu putaran saja, sehingga dengan keunggulan itu tidak diperlukan lagi pemilu putaran kedua. Kemenangan Cristina dalam pemilu tersebut merupakan sejarah baru sepanjang perjalanan politik Argentina. Cristina terpilih sebagai presiden perempuan pertama di negara tersebut yang benar-benar dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis.

Sejarah politik Argentina mencatat, belum pernah ada seorang perempuan yang terpilih menjadi presiden melalui pemilu di negeri tersebut.

Umumnya pucuk kepemimpinan dijabat oleh seorang laki-laki dengan nuansa militerisme yang kuat.¹ Memang pada pemerintahan sebelumnya, yakni pada tahun 1970-an Argentina pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan, yaitu Maria Estella Martinez Peron atau yang lebih dikenal dengan Isabel Peron. Namun posisi Isabel Peron berbeda dengan Cristina. Isabel, yang merupakan istri ke tiga dari Presiden Argentina (Juan Peron) menjadi presiden tanpa mengikuti Pemilu. Ia menjadi presiden menggantikan suaminya yang meninggal pada tahun 1974 saat ia masih dalam masa jabatan sebagai presiden Argentina.²

Atas dasar tersebut dari sisi demokratisasi dapat ditegaskan, bahwa Cristina Fernandez de Kirchner yang memenangi pemilu 2007 adalah *first lady* Argentina untuk pertama kalinya yang berhasil mencatat sejarah baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah politik Argentina, bahkan hampir di seluruh dunia belum pernah ada *first lady* yang bisa menjadi presiden seperti Cristina.

Kenyataan di atas mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut proses pemilihan umum dan faktor-faktor yang menyebabkan Cristina Fernandez de Kirchner mampu memenangi pemilu Argentina 2007 ini sebagai tema penyusunan skripsi dengan judul ***“Kemenangan Cristina Fernandez de Kirchner Sebagai Presiden Perempuan Pertama di Argentina Melalui Pemilu 2007”***.

1 <http://www.hupelita.com/baca.php?id=38818> , dikutip pada 10 Desember 2007, Pkl 15.30.

2 Hidayat Mukmin, *Pergolakan di Amerika Latin dalam Dasawarsa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 76.

B. Latar Belakang Masalah

Republik Argentina adalah sebuah [negara Amerika Latin](#) yang terletak di bagian Selatan Benua [Amerika](#), posisinya berada di antara [Pegunungan Andes](#) di Barat dan [Samudra Atlantik](#) di Selatan. Lokasi ini membuat Argentina dikenal sebagai “negara paling selatan di selatan” atau dalam [bahasa Spanyol](#) disebut “*sur del sur*”. Argentina mempunyai kawasan yang luas dan merupakan negara terbesar kedelapan di dunia, sedangkan Ibu kotanya [Buenos Aires](#) adalah salah satu kota [metropolitan](#) yang terpadat di dunia. Secara geografis negara ini berbatasan dengan [Paraguay](#) dan [Bolivia](#) di sebelah Utara, [Brasil](#) dan [Uruguay](#) di Timur Laut dan [Chili](#) di sebelah Barat.

Sejarah politik Argentina sendiri di mulai sejak negara ini terbebas dari kekuasaan Spanyol dan menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 1816. Rakyat Argentina sepakat untuk menjadikan negara ini sebagai sebuah negara Republik setelah kemerdekaannya, namun demikian negara baru tersebut masih terus berjuang untuk melangsungkan hidup dengan menghadapi berbagai masalah. Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah **terjadi persengketaan antara pihak-pihak yang menginginkan negara ini berkerajaan pusat (*centralist/unitarian*) dengan pihak-pihak yang menginginkan persekutuan (*federalist*). Partai yang pro kerajaan pusat menang pada tahun 1826, dan Bernardino Rivadavia terpilih sebagai Presiden Argentina.**³

Rivadavia telah mencoba membawa pembaharuan. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan mengganti budaya tradisi Spanyol-

³*Ibid.*, hal. 33.

Katholik dengan budaya Perancis yang dinamik dan modern. Namun demikian rakyat Argentina agak konservatif dan menolak budaya asing tersebut. Dua puluh lima tahun kemudian Argentina dipegang oleh partai persekutuan dibawah rejim Juan Manuel de Rosas. Rosas mendapat dukungan dari Kaum Gaucho dan rakyat lain yang merindukan keamanan. Dengan slogan “Stabilitas dan Disiplin” ia berjaya membuat rakyat jatuh hati akibat lama menderita ketidakstabilan dan keganasan.

Berbeda dengan Rivadavia, Rosas lebih berminat mengekalkan “*status quo*” negara, maka ia mencoba membangkitkan semangat nasionalisme rakyatnya. Walaupun Rosas berhasil melindungi Argentina dari pengaruh asing, tetapi kebijakan politiknya itu membuat takut para investor asing. Akibatnya pembangunan ekonomi Argentina menjadi mundur. Rosas juga terlalu berlebihan memberi perhatian pada Buenos Aires, tempat dimana dulu ia menjabat Gubernur, sehingga ia mengabaikan wilayah yang lain. Selain itu ia juga dinilai terlalu campur tangan dalam urusan politik Uruguay. Akibatnya, pemerintahannya berhasil digulingkan oleh Justro de Urquiza, Gubernur Entre Rios pada tahun 1851 sampai dengan berdirinya lembaga baru pada 1853 yang merupakan puncak dari pencapaian persatuan nasional negara tersebut.⁴

Argentina merupakan negara yang paling tidak stabil secara politik. Sejarahpun menunjukkan bahwa politik di Argentina telah di usik oleh kudeta-kudeta militer dengan peralihan kekuasaan kepada sipil yang mengiringinya.⁵

4 <http://www.harry-kk.blogs.friendster.com/juventus/>, dikutip pada 8 Desember 2007, Pkl 10.00.

5 Guillermo O’ Donnell, et.al (ed), *Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Amerika Latin*, LP3ES,

Dari tahun 1930 hingga 1983, tercatat terjadi enam kali kudeta militer, masing-masing pada tahun 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, dan 1976. Selain itu, selama periode jatuh bangun tersebut telah terjadi 25 kali pergantian presiden. Rejim Juan Domingo Peron merupakan rejim terlama yang pernah berkuasa yakni, sepuluh tahun.⁶

Dekade 1980-an merupakan tahun yang suram bagi rejim militer. Pada tahun ini militer mengalami kemerosotan, runtuhnya rejim militer pada tahun 1983 dari kursi pemerintahan Argentina dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya adalah, masalah [ekonomi](#) yang semakin meruncing, korupsi yang kian meningkat, kebencian rakyat terhadap pelanggaran [Hak Asasi Manusia](#), serta yang tak kalah penting adalah peristiwa kekalahan militer Argentina ditangan tentara Inggris pada tahun 1982 dalam [perang Falkland](#) atau di Argentina dikenal sebagai Perang Malvinas, yaitu nama Argentina untuk pulau tersebut.

Kekalahan tersebut telah menjatuhkan imej pemerintahan militer di Argentina. Angkatan bersenjata Argentina terbukti gagal pada bidang keahlian mereka. Akibat kekalahan tersebut memunculkan berbagai tuntutan rakyat terhadap rejim militer hingga akhirnya pada tahun 1983 militer harus mundur dari kursi pemerintahan. Sejak saat itu pemerintahan Argentina telah berusaha untuk menjadi demokratis tetapi terpaksa berhadapan dengan masalah

Jakarta, 1993., hal. 25.

⁶ <http://www.indoprogess.blogspot.com/2006/12/jos-alfredo-martinez-de-hos.html>, dikutip pada 03 April 2008, Pkl. 07.00.

ekonomi yang cukup parah.⁷

Pemerintahan demokrasi yang baru ini kemudian mencoba untuk menjalankan sistem demokrasi yang sesungguhnya dan mencoba mengatasi masalah yang ada, namun sepertinya apa yang telah dilakukan oleh penguasa-penguasa yang baru belum juga mampu mengatasi masalah tersebut. Akibat kondisi keterpurukan yang berkepanjangan tersebut, di Argentina terjadi instabilitas politik yang amat luar biasa. Ekses politik dari kondisi ini adalah “keguncangan” pemerintahan. Pada masa ini di Argentina pernah terjadi pergantian lima kepemimpinan dalam dua pekan. Setelah Presiden Fernando de la Rúa, menyatakan pengunduran dirinya pada 20 Desember 2001, kepemimpinan dijabat oleh Ramón Puerta (21-23 Desember 2001), Adolfo Rodríguez Saá (23 Desember 2001-1 Januari 2002), Eduardo Camano (1-2 Januari 2002), dan Eduardo Duhalde (2 Januari 2002-25 Mei 2003).⁸

Kelima sosok tersebut tak bertahan lama. Kasus yang paling jelas terjadi adalah saat kepemimpinan presiden terpilih Eduardo Duhalde yang menyatakan mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Duhalde mundur dari kursi kepresidenan karena ketidakmampuannya menangani masalah krisis yang ada dan menyatakan negara ini bangkrut. Hal tersebut merupakan alasan yang sama bagi lengsernya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Kemunduran Eduardo Dulhade ini ditindaklanjuti dengan digelarnya pemilu. Pemilu yang dilaksanakan pada 25 Mei 2003 yang telah berhasil mengantarkan Nestor Kirchner pada kursi presiden. Kemenangan yang

⁷ http://www.ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Argentina, dikutip pada 05 April 2008, Pkl 14.00.

⁸ *Ibid.*

diperoleh Kirchner pun masih harus dihadapkan pada masalah “klasik” yang sama, yaitu masalah ekonomi yang tak kunjung membaik, bahkan saat itu perekonomian Argentina dapat disebut terpuruk.

Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Argentina mencerminkan kehidupan politik yang demokratis di negara tersebut. Pemilu merupakan wadah bagi partai-partai politik yang bertindak sebagai alat perwakilan dan sebagai sarana untuk pergantian pemerintahan. Melalui Pemilu, terjadi proses pergantian kekuasaan secara konstitusional melalui suksesi kepemimpinan politik di negara yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemilu merupakan alternatif terbaik untuk menentukan figur pemimpin politik seperti apa yang menjadi harapan rakyat yang dianggap mampu memperjuangkan aspirasi atau kepentingannya agar rakyat dapat benar-benar berdaulat dengan menggunakan haknya untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi Presiden.

Dari uraian tersebut, ditinjau dalam perspektif gender, sistem demokrasi yang mulai diterapkan sejak lengsernya pemerintahan militer 1983 di negara tersebut dapat dikatakan masih mengalami suatu sistem yang belum sempurna atau cacat demokrasi. Hal tersebut ditandai oleh peran serta perempuan dalam dunia politik yang masih terbatas. Sebagaimana permasalahan yang dihadapi kaum perempuan di negara-negara berkembang, keberadaan perempuan di Argentina tak jauh berbeda. Kaum hawa mengalami ketimpangan yang ditandai dengan minimnya partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, terutama dalam sektor publik dan politik. Kursi

pemerintahan negara lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Jabatan tertinggi dalam negara yang diperoleh melalui Pemilu sejauh ini juga selalu ditaklukkan oleh kaum laki-laki. Singkatnya, dalam konteks partisipasi perempuan, demokrasi di Argentina belum berdiri tegak.

Pasca berakhirnya rejim militer 1983 dan bergulirnya demokratisasi di Argentina, posisi penting dan tertinggi di negara tersebut selalu diisi oleh kaum laki-laki, yaitu [Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes](#) (10 Desember 1983-9 Juli 1989), [Carlos Menem](#) (8 Juli 1989-10 Desember 1999), [Fernando de la Rúa](#) (24 Oktober 1999-20 Desember 2001), [Adolfo Rodríguez Saá](#) (23 Desember 2001-1 Januari 2002), Eduardo Duhalde (2 Januari 2002-25 Mei 2003) serta Nestor Kirchner (2003-2007).

Seiring bergulirnya waktu, kehidupan politik dan iklim demokrasi di Argentina semakin menunjukkan perkembangan dan kemajuan ke arah yang lebih baik. Eksistensi kaum perempuan kini lebih diakui di “negeri perak” tersebut. Setelah masa transisi, secara normatif perubahan besar ini diawali dengan ditetapkannya *Ley de Cupos* (undang-undang regulasi kuota bagi perempuan) yang diundangkan pada tahun 1991.

Regulasi kuota adalah bagian dari *affirmative actions* atau disebut juga “diskriminasi positif” sebagai penyeimbang pengalaman historis yang diskriminatif terhadap perempuan. Di Argentina, regulasi kuota bersifat wajib untuk dipenuhi setiap partai politik (partai) dimana salah satu ketentuan penting dari *Ley de Cupos* ini mengatur bahwa setiap partai politik untuk paling tidak memenuhi 30% (persen) calon legislatif perempuan dalam proporsi yang

memiliki kemungkinan untuk terpilih.

Cristina Fernandez de Kirchner, yang merupakan kandidat dari Koalisi Front (*Front for Victory*) adalah sosok wanita dari golongan sipil yang berhasil membuktikan keberhasilan perempuan dengan memenangkan Pemilu Presiden Argentina 2007.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik pertanyaan sebagai berikut: “Mengapa Cristina Fernandez de Kirchner, yang notabene seorang perempuan, berhasil memenangi pemilu presiden 2007, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah Argentina?”

D. Kerangka Dasar Teori

Seperti sudah menjadi kelaziman bahwa dalam suatu penciptaan karya ilmiah, teori memegang peranan yang sangat penting. Teori merupakan bentuk penjelasan yang paling umum, dimana teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Selain dapat digunakan sebagai eksplanasi teori juga dapat dijadikan sebagai dasar suatu prediksi.

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, teori memegang posisi kunci yaitu sebagai alat analisis dan sebagai alat prediksi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam suatu negara. Dalam hal ini fungsi dari teori adalah sebagai ”kaca mata” untuk melihat dan memperjelas suatu fenomena agar dapat dengan mudah untuk dikaji oleh seseorang.

Penulisan skripsi ini didasarkan atas konsep dan teori-teori, yakni konsep demokrasi, teori legitimasi teori feminisme dan teori kharismatik.

1. Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi sebetulnya bukanlah suatu konsep politik modern tentang pengaturan negara, tata kehidupan masyarakat, dan hak-hak masyarakat bernegara, akan tetapi nilai-nilai dari demokrasi tersebut telah mendarah daging pada masyarakat Yunani pada masa lalu dan telah menjadi nilai-nilai yang dianut oleh seluruh masyarakat dunia pada masa sekarang.

Konsep demokrasi yang ada pada saat ini dirasakan berasal dari dunia barat, khususnya Amerika, karena negara tersebutlah yang telah menjunjung tinggi dan menggembor-gemborkan keseluruhan dunia tentang teori demokrasi agar seluruh negara di dunia ikut menganutnya. Paham ini memiliki pengertian dengan mengagung-agungkan orang-orang dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, yaitu sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terhadap suatu keputusan yang telah atau akan diambil oleh pemerintah karena keputusan yang telah diambil oleh pemerintah tersebut sudah tentu akan berimbas pada rakyat.

Dunia barat memiliki hegemoni tentang konsep demokrasi ini dalam pemerintahan yaitu suara mayoritas rakyat merupakan perwujudan dari suara Tuhan (*people voice as the infinite voice*). Konsep demokrasi biasanya dilaksanakan dengan sistem perwakilan di dalam pemerintahan. Kajian teoritis konseptual tentang demokrasi mulai bergaung ketika terjadi transisi demokrasi yang mulai marak pasca perang dunia kedua, ketika banyak rejim otoritarian

tumbang dari kursi kekuasaannya.

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demoskratos*. Istilah tersebut berasal dari dua suku kata, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” atau “*kratein*” yang berarti pemerintahan. Sehingga apabila diartikan secara keseluruhan memiliki arti pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat.⁹

Dalam *Declaration of Independence of America* kata demokrasi memiliki arti suatu pemerintahan yang dilakukan ”Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”. Bagi rakyat, demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi dimana warga negara atau rakyat memiliki kontrol yang efektif terhadap kebijakan dari pemerintah, musyawarah yang rasional dan didukung dengan informasi yang cukup, partisipasi dan kekuasaan yang setara dan berbagai kebajikan warga negara lainnya.¹⁰

Robert A. Dahl, mendefinisikan demokrasi sebagai “*Political freedom of speak, publish, assemble and organize*”. Jadi demokrasi adalah suatu kebebasan politik untuk berbicara, berorganisasi dan kebebasan pers. Dalam negara demokrasi, setiap orang memiliki kesempatan untuk berekspresi berdasarkan hak-haknya sebagai warganegara, yaitu hak untuk berbicara, serta hak untuk berorganisasi, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Demokrasi dalam kehidupan bernegara hanya bisa diperoleh atau mungkin hanya tersedia kalau lembaga-lembaga dalam masyarakat bisa

9 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 352.

10 Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, PT Pustaka Utama Grafiti Pers, Jakarta, 2000, hal. 57.

menjamin adanya delapan kondisi sebagai berikut:¹¹

- 1.) Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi.
- 2.) Kebebasan mengungkapkan pendapat.
- 3.) Hak untuk memilih dalam pemilihan umum.
- 4.) Hak untuk menduduki jabatan publik.
- 5.) Hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara.
- 6.) Tersedianya sumber-sumber informasi alternatif.
- 7.) Pemilihan umum yang bebas dan adil.
- 8.) Adanya lembaga-lembaga yang menjamin agar kebijaksanaan publik tergantung kepada perolehan suara dan pengungkapan preferensi lainnya.

Untuk dapat memperoleh iklim demokrasi dalam sebuah pemerintahan di sebuah negara biasanya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Yang *pertama*, pergerakan untuk merombak suatu bentuk pemerintahan dengan yang demokratis. Maksudnya adalah bahwa apabila sistem pemerintahan yang telah ada dan dirasakan oleh rakyat belum memunculkan situasi demokratis, perlu diadakan perombakan agar dalam sistem pemerintahan tersebut mencerminkan adanya distribusi kekuasaan yang merata. Dimana rakyat tidak selalu diajak dalam pengambilan suatu keputusan maka jadi turut ikut andil dalam pengambilan kebijakan.

Keterlibatan warga negara atau rakyat dalam suatu negara dalam

¹¹ Mochtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal. 20.

konsep demokrasi telah diatur yaitu dengan adanya lembaga-lembaga di atas adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Ketiga lembaga tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga penyelenggara pemerintahan tersebut harus memiliki kedudukan dan kekuasaan yang setara sehingga mencerminkan distribusi kekuasaan yang merata dalam suatu negara, dan dapat saling mengawasi sehingga ketika ada suatu kebobrokan yang terjadi dalam suatu lembaga maka dapat segera diketahui dan segera disembuhkan.

Yang *kedua* adalah penerapan sistem demokratisasi. Sistem demokrasi memunculkan adanya mekanisme pemerintahan *Check and Balance* atau adanya keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dengan proporsinya masing-masing, satu sama lain tidak boleh saling mempengaruhi (dalam konotasi yang negatif) dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan yang berjuang pada ketidakmaksimalan dalam bekerja.

Yang *ketiga* adalah pendemokrasian, maksudnya adalah peningkatan pelaksanaan nilai-nilai yang bersifat demokratis dalam negara seperti keterbukaan pemerintah, kebebasan individu, persamaan hak, dan partisipasi warga negara secara aktif.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan mengenai beberapa hal yang terkait dalam konsep demokrasi, maka dapat menjadikan ulasan dalam kasus demokratisasi di Argentina. Di mana pada kasus yang terjadi di Argentina, meskipun negara tersebut menganut sistem demokrasi, namun sistem yang ada

belum berjalan sepenuhnya demokratis. Dari beberapa indikasi yang dipaparkan oleh Robert A. Dahl di atas, ternyata indikasi-indikasi partisipasi politik bagi wanita dan “supremasi sipil” ternyata belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Dominasi kaum laki-laki masih terlihat nyata, terutama dalam bidang politik dan pemerintahan. Dari hal ini kita dapat menilai adanya cacat demokrasi, yang mana eksistensi maupun keterlibatan warga negara dalam dunia politik sejak runtuhnya kekuasaan militer di Argentina pada tahun 1983 lebih di dominasi kaum laki-laki, eksistensi perempuan seakan surut dari pandangan mata.

Seiring berjalannya waktu perubahan pun mulai terlihat. Sekitar tahun 1991 kaum perempuan mulai menunjukkan kemampuannya yang dapat disandingkan kualitasnya dengan kaum laki-laki yang cukup lama mendominasi kekuasaan, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya partisipasi perempuan Argentina terhadap kekuasaan khususnya pada lembaga perwakilan. Beberapa tahun kemudian, salah satu perempuan Argentina telah berhasil membuktikan kemampuannya, yakni Cristina Fernandez de Kirchner yang memenangi kursi kepresidenan melalui Pemilu 2007. Hal tersebut seolah menjadi suatu gambaran bahwa perubahan yang secara bertahap telah terjadi di negara tersebut dan demokratisasi yang sesungguhnya telah berjalan.

2. Teori Legitimasi

Persoalan legitimasi adalah sebuah persoalan pokok dalam sebuah kekuasaan atau sistem hukum yang telah lama dan menjadi salah satu

persoalan mendasar dalam perdebatan politik. Dalam perdebatan politik moderen, legitimasi biasanya didefinisikan hanya sebagai “*rightfulness*” atau pembenaran.

Legitimasi berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata “*legitimere*”, yang berarti pernyataan kewenangan berdasarkan hukum. Secara garis besar legitimasi ini menunjuk pada kewenangan memerintah.¹²

The term legitimacy from the latin legitimare, meaning to declare lawful broadly means rightfulness. Legitimacy therefore confers on an order or command an authoritative or binding character, thus transforming power into authority. It differs from legality in that the latter does not necessarily guarantee that a government is respected or that it is citizens acknowledge a duty of obedience.

Secara konseptual legitimasi ini sangat berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan. Artinya, apakah masyarakat menerima atau mengakui hak moral pemimpin untuk membuat atau melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat atautakah tidak. Apabila masyarakat menerima atau mengakui hak moral pemimpin untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang mengikat masyarakat, maka kewenangan itu dikategorikan “berlegitimasi”, dengan kata lain legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.¹³

Berkaitan dengan legitimasi, Soerjono Soekanto menggambarkan hubungan antara legitimasi dengan kedudukan atau posisi seseorang. Dalam

12 Andrew Heywood, *Foundations Politics*. Mac Millan Published, London, 1997, hal. 193.

13 Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1992, hal. 92.

kaitan ini ia menyatakan dua cara memperoleh kedudukan, yaitu:¹⁴

1. *Ascribed Status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula.
2. *Achieved Status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh berdasarkan kelahiran, tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung pada kemampuan masing-masing dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya.

Dalam teori ini juga kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu *Assigned Status*, yang merupakan kedudukan yang diberikan. *Assigned Status* sering mempunyai hubungan erat dengan *Achieved Status*. Artinya suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

1. Simbolis, memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral, emosional,

14 Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar dalam Sosiologi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1969, hal. 264-267.

tradisi, kepercayaan serta nilai nilai budaya pada umumnya dalam bentuk simbol-simbol, penggunaan simbol-simbol untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi serta kecenderungan yang bersifat ritualistik, sakral, retorik, dan mercusuar. Contohnya: upacara kenegaraan yang megah, parade militer, penganugrahan tanda-tanda kehormatan dan penghargaan, dan lain-lain.

2. Prosedural, dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat, presiden dan wakil presiden, dan para anggota lembaga tinggi negara atau melalui referendum untuk mengesahkan suatu kebijakan umum, Penggunaan metode prosedural atau pemilihan umum, mulai dari pencalonan, persaingan bebas, dan penyelenggaraan yang dimulai dengan pemilihan dari yang bersifat umum, langsung, rahasia serta jujur dan adil (*fair*) sampai yang penuh dengan manipulasi dan intimidasi. Bagi sementara negara atau sistem politik tertentu, penyelenggaraan pemilihan umum dianggap cukup untuk menunjukkan pemerintahan memiliki legitimasi,
3. Materiil, dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materiil kepada masyarakat seperti menjamin tersedianya kebutuhan dasar (*basic needs*), fasilitas kesehatan dan pendidikan, sarana produksi pertanian, sarana komunikasi dan transportasi, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dan modal memadai.

Teori legitimasi memiliki kesamaan dengan otoritas atau kewenangan. Legitimasi dapat disebut sebagai kekuasaan yang benar. Yang

dapat membedakan keduanya adalah bahwa apabila kita berbicara tentang legitimasi kita akan dihadapkan pada keseluruhan sistem pemerintahan, sehingga dapat dikatakan apabila kita berbicara tentang legitimasi berarti kita berbicara tentang rejim.¹⁵

Kemenangan Cristina pada Pemilu Argentina 2007 memberikan penjelasan bahwa kemenangan tersebut didapatkan berdasarkan legitimasi rakyat Argentina yang memberikan hak suara dan memilihnya pada Pemilu sehingga ia berhasil menjadi Presiden Argentina Periode 2007-2011. Hal tersebut merupakan legitimasi yang didapatkan secara prosedural dimana Argentina yang menganut sistem demokrasi, menyelenggarakan pemilu sebagai sarana suksesi kepemimpinan nasional.

3. Teori Feminisme

Feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak antara perempuan dengan laki-laki. Akar historis gerakan ini muncul sekitar tahun 1800-an, karena banyak orang yang melihat perempuan hanya sebagai sub-ordinat dan perannya dianggap “tidak penting” laki-laki.¹⁶ Bagi masyarakat pada saat itu, tempat yang paling baik dan pantas untuk perempuan, bahkan bisa dikatakan suatu keharusan, adalah di rumah. Pada masa tersebut, hukum (undang-undang) pun mencerminkan hal ini. Misalnya saja, larangan untuk memilih pada saat

15 Deden Faturahman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, UMM Press, Malang, 2002, hal. 40-41.

16 The World Book Encyclopedia, hal. 49.

pemilihan umum bagi perempuan, sebagian besar institusi, atau pendidikan tingkat tinggi bahkan pekerjaan-pekerjaan tertentu juga tertutup bagi kaum perempuan. Meskipun pada saat itu ditentang, gerakan ini kemudian tumbuh pesat dan berkembang sehingga berhasil membuat perempuan “memenangkan” kembali hak-hak politiknya. Namun pada era tersebut, setelah berhasil ternyata gerakan feminis dengan perlahan-lahan mulai menghilang.

Dalam sebuah literatur, disebutkan bahwa Feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Feminisme menggabungkan berbagai metode analisis dan teori, jika feminisme dianggap sebagai teori dari sudut pandang perempuan.¹⁷

Menurut Siti Muslikhati, perbincangan mengenai feminisme pada umumnya merupakan perbincangan tentang bagaimana pola relasi dan perempuan dalam masyarakat, serta bagaimana hak, status dan kedudukan perempuan di sektor domestik dan publik.¹⁸

Dalam tataran ide (sebuah kesadaran), yang kemudian melahirkan sebuah gerakan, feminisme pada intinya membicarakan masalah kultur. Kaum feminis mempertanyakan mengapa label maskulin selalu dilekatkan pada laki-laki dan label feminim selalu dilekatkan pada perempuan. Pemahaman yang

17 Ensiklopedia Feminisme, hal. 158. dikutip dari <http://www.wikipedia.com>, diakses pada 27 Januari 2008, pkl 11.00.

18 Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hal. 17.

baik tentang wilayah kultur tersebut memungkinkan mereka mempunyai peluang untuk berbicara perubahan sosial.¹⁹

Dalam wilayah kultur ini, mitos-mitos perempuan menemukan realitasnya dalam tatanan masyarakat tradisional. Misalnya dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, perempuan dianggap lebih sesuai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, semisal, memasak, mengatur rumah tangga, menjaga anak dan pekerjaan di luar rumah yang dianggap ringan. Sedangkan laki-laki melakukan pekerjaan di luar rumah yang dianggap memerlukan otot dan keberanian.

Menurut Mansour Fakih, dalam prespektif gender, spesifikasi peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tersebut mengalami ketimpangan (tidak egaliter), disatu sisi konstruksi sosial selama ini dianggap berpihak kepada laki-laki dan pada saat yang bersamaan menyudutkan kaum hawa, dan hegemoni tersebut, menurut kaum hawa memperoleh legitimasi dari nilai-nilai sosial, agama, hukum negara dan lain sebagainya serta tersosialisasikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.²⁰

Modernisasi yang terjadi di dunia barat lewat revolusi industri merupakan momentum balik kehidupan masyarakat, termasuk bagi keberadaan kaum perempuan. Proses ini menawarkan berbagai perubahan, baik variasi kebutuhan, jenis pekerjaan maupun cara pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam masyarakat. Kaum perempuan mulai terpancing ke luar

19 *Ibid.*, 21

20 Mansour Fakih, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", dalam Siti Muslikhati, *Ibid.*, hal. 31.

ke sektor publik dengan tanggung jawabnya yang tetap terhadap sektor domestik. Masa ini dalam tataran wacana dikenal dengan periode awal bagi gerakan feminisme dunia atau disebut dengan feminisme gelombang pertama.

Lalu, mulai muncul feminis gelombang kedua yaitu sekitar tahun 1960-an. Pada periode ini, kaum perempuan sudah mulai memasuki dunia kerja yang pada awalnya hanya diperbolehkan untuk dan oleh pria, karena perempuan dianggap hanya memiliki satu pekerjaan, yaitu menjadi ibu rumah tangga. Ternyata, para perempuan tersebut merasakan ketidakadilan dalam dunia kerja. Banyak jenis pekerjaan dan jabatan-jabatan tinggi yang hanya bisa dipegang oleh laki-laki. Perempuan sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memegang jabatan-jabatan tersebut. Selain itu, di periode ini, pada waktu yang bersamaan di Amerika muncul juga kekecewaan terhadap politik *civil rights*, gerakan anti perang, dan gerakan mahasiswa untuk masyarakat demokratis. Hal ini membuat perempuan, khususnya di Amerika membentuk sebuah gerakan penyadarannya sendiri.

Gerakan feminis gelombang kedua ini membawa perubahan utama pada konsep feminisme, yaitu pergeseran dari meminimalisir perbedaan antara laki-laki dan perempuan menjadi munculnya pemujaan perspektif yang berpusat pada perempuan.²¹ Feminisme gelombang kedua ini merupakan proyek transformasi radikal dan bertujuan untuk menciptakan dunia yang difeminiskan.

Dalam perkembangannya muncul banyak gerakan feminis yang lain.

Oleh karena itulah, memetakan pemikiran feminis kemudian bukanlah hal

²¹Ensiklopedia Feminisme, *Op.Cit.*, hal. 415.

yang mudah. Keragaman dan kompleksitasnya mungkin sama dengan rumitnya jalan pikiran seorang perempuan itu sendiri. Saat ini dikenal berbagai jenis atau ragam feminisme diantaranya feminis liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme sosialis, feminisme posmo, psikoanalisis gender, essentialis, dan sebagainya. Aliran tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai berbagai hal. Meskipun, pada dasarnya tujuan mereka sama, kebahagiaan dan kebaikan bagi kelompok yang disebut perempuan.

Salah satu pendapat mengenai hal tersebut ditegaskan Kamia Bashin dan Ninghat Said Khan, yang menyatakan bahwa meskipun feminisme telah berkembang, sampai sejauh ini, tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat diterima oleh atau diterapkan kepada semua feminis disemua tempat dan waktu. Hal tersebut disebabkan karena definisi feminisme berubah-ubah sesuai dengan perbedaan realitas sosial-kultural yang melatarbelakangi kelahirannya serta perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, serta tindakan yang dilakukan para feminis itu sendiri.²²

Meskipun demikian feminisme harus didefinisikan secara jelas dan luas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Salah satu pendefinisian tersebut adalah feminisme didefinisikan sebagai kesadaran akan penindasan dan pemerasan (diskriminasi) terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.²³

22 Kamia Bashin dan Ninghat Said Khan, "Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya", dalam Siti Muslikhati, *Op.Cit.*, hal. 18.

23 *Ibid.*

Dari semua hal tersebut penggeneralisasian feminisme sebagai sebuah konsep tunggal yang anti laki-laki sedikit tidak pada tempatnya. Karena yang sebenarnya diperjuangkan adalah keadilan sebagai seorang manusia yang baik sengaja maupun tidak, telah diberi label “perempuan”.²⁴

Seiring dengan bergulirnya nuansa demokratisasi yang sekuler, gerakan perempuanpun semakin menyadari betapa sesungguhnya keterbelakangan mereka bukanlah semata-mata karena kebodohan dan kemiskinan, tetapi bersifat struktural dan sistemik. Mereka memandang ketimpangan dan ketidakadilan tersebut terbentuk karena pengendalian masyarakat oleh dominasi laki-laki dalam budaya patriarki. Mereka menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam dunia kerja dan pendidikan tidak secara otomatis meningkatkan status perempuan. Diperlukan perjuangan yang lebih bersifat strategis untuk menyelesaikan masalah perempuan, yaitu keterlibatan dalam lapangan politik. Asumsi tersebut memotivasi para pejuang perempuan untuk melakukan pemberdayaan politik perempuan dengan target terpenting diberikan dan diakuinya keterlibatan perempuan dalam jantung kendali masyarakat, yaitu dalam posisi penentu kebijakan (*the authorities*), apakah legislatif ataupun eksekutif.²⁵

Seperti halnya perubahan yang terjadi dalam perjalanan politik Argentina. meskipun di negara tersebut eksistensi perempuan sempat dipertanyakan keberadaannya, namun seiring berjalannya waktu, negara

24 Ben Agger, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implementasinya*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006, hal. 214.

25 G.K Robert dan Jill, “Sistem Politik Demokrasi”, dalam Siti Muslikhati, *Op.Cit.*, hal. 27.

tersebut telah mampu menunjukkan perubahan yang cukup stabil mengenai kesetaraan eksistensi dalam kursi pemerintahan. Kemenangan Cristina pada Pemilu Presiden 2007 kali ini pun seakan memberi jawaban cukup jelas bahwa dalam perspektif gender, perempuan di Argentina telah mendapatkan dan menggunakan hak-haknya, yaitu persamaan hak dalam partisipasi politik. Perempuan menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih serta memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki untuk menduduki jabatan publik. Kemenangan tersebut juga telah menunjukkan kemampuan, eksistensi dan kualitas perempuan di bidang politik sehingga dapat disandingkan dengan kaum laki-laki tanpa adanya diskriminasi kesetaraan yang selalu didasarkan pada perbedaan jenis kelamin saja.

Kemenangan Cristina membuktikan bahwa untuk seorang kepala negara di Argentina tidak harus laki-laki dan/atau dari golongan militer. Cristina Fernandez, yang *nota bene* seorang perempuan dan bukan dari golongan militer ternyata dapat menjadi pemimpin tertinggi di negeri tersebut, yakni menjadi seorang presiden perempuan pertama di Argentina.

4. Teori Otoritas Kharismatik

Tipe ideal Weber tentang tindakan bisa digunakan untuk menyusun gambaran-gambaran terpadu mengenai manusia individual menurut campuran khusus tipe ideal kegiatan-kegiatan yang menyusun tingkah laku aktual mereka, tetapi perhatian dari teori Weber tentang masyarakat adalah mempergunakan analisis-analisisnya atas tindakan rasional-tujuan, rasional-

nilai, efektif dan tradisional sebagai sarana untuk berfikir mengenai masyarakat menurut tipe ideal interaksi sosial dan pengelompokan sosial.

Gagasan mengenai norma-norma yang sah atau tatanan yang legitim bersifat fundamental untuk teori Weber mengenai masyarakat. Weber membuat garis besar untuk tiga tipe ideal tatanan atau otoritas yang legitim yang mana didasarkan pada hubungan antara tindakan-tindakan dengan dasar hukum yang berlaku. Dalam hal ini dia memperhatikan sifat dasar wewenang tersebut, oleh karena itulah yang menentukan kedudukan penguasa yang memiliki wewenang, diantaranya yaitu wewenang kharismatik (*charismatic authority*) yang mana wewenang tersebut dapat menjelaskan tentang fenomena kemenangan Cristina Fernandez de Kirchner yang memenangi Pemilu 2007 di Argentina sebagai presiden perempuan pertama .

Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada “kharisma”, yaitu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Kemampuan khusus tadi melekat pada orang tersebut, karena anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan kemampuan tersebut, orang-orang disekitarnya mengakui akan adanya kemampuan tersebut, atas dasar kepercayaan dan pemujaan, oleh karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tersebut adalah sesuatu yang berada di atas kekuatan dan kemampuan manusia umumnya. Sumber dari kepercayaan dan pemujaan tersebut adalah karena kemampuan khusus tadi pernah terbukti manfaat serta kegunaannya bagi masyarakat.

Wewenang kharismatik tersebut akan dapat tetap bertahan selama

dapat dibuktikan manfaat dan kegunaannya bagi seluruh masyarakat. Kharisma tersebut semakin meningkat sesuai dengan kesanggupan individu yang bersangkutan untuk membuktikan manfaatnya bagi masyarakat sehingga pengikut-pengikutnya akan mengikutinya. Wewenang atau otoritas kharismatik dapat berkurang apabila ternyata individu yang memilikinya memiliki atau berbuat kesalahan-kesalahan yang merugikan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadi berkurang. Dengan kata lain, kharismanya akan berkurang atau bahkan akan lenyap bila mental individu yang mendukungnya tidak kuat. Contoh dari orang-orang yang mempunyai kharisma misalnya adalah para Nabi, Rasul, Penguasa-penguasa yang terkemuka dalam sejarah dan seterusnya yang luar biasa kesuciannya, heroismenya atau keutamaannya yang memungkinkan mereka untuk memerintah sebagian atau sejumlah besar orang dalam hubungan-hubungan temu muka.²⁶

Seperti dalam tesis Meng-Tse (Mencius) yang menyatakan bahwa suara rakyat adalah “suara Tuhan” (karena menurutnya itulah satu-satunya cara Tuhan berbicara) mempunyai makna yang sangat spesifik: jika rakyat sudah tidak lagi mengakui penguasa, maka dinyatakan dengan jelas bahwa ia menjadi warga negara biasa, sekiranya kemudian ia berharap lebih, maka ia akan menjadi seorang perampas yang layak mendapat hukuman.²⁷

Para pengikut bisa memberikan “pengakuan” yang lebih aktif atau pasif bagi misi personal master kharismatik. Kekuasaannya bersandar pada

26 Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 173-174.

27 Max Weber, *Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 298.

pengakuan yang sepenuhnya faktual ini dan berasal dari kesetiaan sepenuh hati. Kesetiaan pada sesuatu yang luar biasa dan belum pernah ada sebelumnya, kesetiaan pada sesuatu yang asing bagi semua kaidah dan tradisi, dan area itu dianggap sebagai “ilalahiah”. Inilah kesetiaan yang lahir dari masa-masa sulit dan antusiasme.

Teori kharismatik ini juga pada dasarnya didominasi oleh indikator elemen, antara lain:²⁸

1. Faktor keturunan (*Decline Factor*), elemen ini sangat berpengaruh pada Negara-negara yang berfaham monarki. Apabila tokoh tertentu merupakan bagian dari silsilah bangsawan, maka tidak dapat dipungkiri nilai-nilai masih melekat terhadapnya.
2. Faktor pembebas (*Acquitted Factor*), faktor ini juga sangat berpengaruh dalam membentuk kharisma seseorang. Kasus yang semacam ini terkadang menjadikan seseorang sebagai patriot terhadap masalah yang dihadapi publiknya.

Apa yang terjadi di Argentina saat ini adalah merupakan kesetiaan rakyat Argentina yang menganggap Nestor Kirchner sebagai seorang yang telah mampu mengangkat Argentina dari jurang kehancuran sebagai dampak krisis yang telah lama melanda negara itu. Saat akan dilaksanakan pemilihan presiden, karena Nestor enggan dipilih lagi, maka istrinya, Cristina kelimpahan kharisma sehingga daya popularitasnya terdongkrak, sehingga

28 Dikutip dari Skripsi Jaka Kurniadi (NIM: 99510266): “*Kemenangan Victor Yushchenko pada Pemilu Ulang Putaran kedua di Ukraina*”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2006, hal. 13-14.

pada saat pelaksanaan pemilu publik pun kelihatannya mengidentikan Cristina dengan sang suami, mereka menganggap dengan memilih Cristina sebagai Presiden dalam Pemilu tersebut maka sama halnya dengan memilih Nestor Kirchner. Rakyat tak mau ambil risiko dengan memilih calon lain, karena telah demikian terpikat pada keberhasilan Nestor, dan rakyatpun begitu percaya dengan kepemimpinan Cristina mendatang pasti tidak jauh dari pengaruh kerjasama diantara keduanya untuk membangun negara menuju kepada kondisi yang lebih baik lagi.

Dari kasus di atas, dapat disebutkan bahwa Cristina merupakan tokoh yang mendapat keuntungan politik dan simpati dari masyarakat Argentina. Keuntungan tersebut diperoleh melalui popularitasnya saat ia menjadi Ibu negara, dan dari pribadi Cristina sendiri yang mempunyai keberhasilan di berbagai bidang, selain terkenal sebagai seorang politikus dan senator, ternyata Cristina juga seorang pengacara handal dan penasihat presiden di negara tersebut.

E. Hipotesa

Kemenangan Cristina Fernandez de Kirchner sebagai Presiden Perempuan pertama melalui Pemilu 2007 di Argentina disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor kemenangan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1). Faktor Internal, yang berupa:
 - a. Faktor keturunan, yaitu faktor yang didapati Cristina dari

suaminya dalam bentuk limpahan kharisma. Yang mana dalam hal tersebut, posisi Cristina sebagai *first lady* tergantung pada kesuksesan atau prestasi yang diperoleh suaminya.

b. Faktor pembebas, yaitu faktor yang berasal dari kualitas pribadi yang dimiliki Cristina sendiri.

2). Faktor Eksternal yaitu berupa dukungan dari dunia internasional, terutama negara-negara tetangga Argentina di Amerika Latin. Dukungan tersebut didapatkan atas kepopuleran Cristina sebagai *first lady* Argentina di luar negeri semasa suaminya menjabat Presiden dan melakukan internasional dengan negara lain.

F. Metodologi Penelitian

Analisis yang tertuang dalam skripsi ini merupakan hasil studi kepustakaan. Bahan-bahan pustaka yang digunakan baik sebagai sumber data maupun sebagai rujukan meliputi :

1. Buku-buku ilmiah yang mendukung penulisan
2. Internet atau Web Site
3. Majalah dan surat kabar
4. Artikel, jurnal, diktat kuliah, dan media lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.

G. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor atau sebab-sebab terpilihnya Cristina Fernandez de Kirchner sebagai Presiden perempuan pertama melalui Pemilu 2007 di Argentina.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Jangkauan Penulisan

Fokus utama dari penulisan ini adalah kemenangan Cristina dari Koalisi Front, sebagai presiden perempuan pertama melalui pemilu 2007 di Argentina. Pembahasan akan dimulai dari masa pemerintahan sebelumnya, yakni pada tahun 2003, sampai dengan masa kampanye Cristina hingga dilaksanakannya pemilu 2007. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan apabila penulis akan menjelaskan masalah diluar batasan tersebut untuk memperkuat dan dapat dijadikan data pendukung penulisan, dalam catatan diperhatikan relevansinya.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari skripsi yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan, kemudian

hipotesa, metodologi penelitian, serta tujuan dan jangkauan penulisan.

BAB II Membahas sistem politik demokrasi di Argentina pasca runtuhnya rejim militer pada tahun 1983. Pada bab ini akan diuraikan transisi demokrasi yang terjadi di Argentina dengan memaparkan sus-sub sistem politik Argentina, yang terdiri dari sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan sistem pemilu yang berlaku di negara Argentina.

BAB III Menjelaskan tentang pemilu Argentina 2007 dan kemenangan yang didapatkan oleh Cristina dalam pemilu tersebut. Dari bab ini akan terurai bahwasannya di Argentina demokratisasi telah berjalan dan tidak ada lagi problem gender dalam jabatan publik yang dibuktikan dengan kemenangan Cristina sebagai presiden perempuan pertama Argentina.

BAB IV Akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Cristina pada Pemilu 2007 Argentina.

BAB V Adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya.